

Masa reses DPR yang dilakukan saat kampanye jelang Pemilu 2014 (6 Maret – 15 Mei 2014) berpotensi penyimpangan dana reses. Koalisi Revisi UU MD3 menilai salah satu bentuk penyimpangan yakni masa tersebut bisa dijadikan sarana kampanye pribadi calon legislative. Dugaan penyimpangan dana reses tidak hanya terjadi di tingkat DPR RI namun bisa dilakukan oleh DPD maupun DPRD.

Konferensi pers dihadiri oleh tiga anggota Koalisi yakni Indonesia Budget Center (IBC) diwakili oleh Roy Salam, Komunitas Indonesia untuk Demokrasi (KID) diwakili oleh Ibeth Koesrini, dan Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) yang diwakili oleh Lucius Karus. Kegiatan dilaksanakan di Media Center Bawaslu RI hari Kamis 20 Maret 2014.

Koalisi juga mendesak Bawaslu dan jajarannya untuk melakukan pemantauan terhadap masa reses yang dilakukan oleh caleg agar tidak terjadi penyimpangan anggaran negara. (EK)

### **Pers Release**

- [Potensi Penyimpangan Reses DPR, DPD dan DPRD di Pemilu 2014](#)

### **Link berita terkait:**

- [Harian Nasional](#)
- [Jurnal Nasional](#)
- [Republika](#)
- [The Jakarta Post](#)
- [Rumah Pemilu](#)
- [Hukum Online](#)
- [Berita MSN](#)
- [Bawaslu](#)

{gallery}konpres032014{/gallery}